



**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMKO
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ROINDAH
1615100216**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROINDAH
NPM : 1615100216
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMKO MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn)

PEMBIMBING II

(Dra Mariyam, Ak., MSi., CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ROINDAH
NPM : 1615100216
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMKO MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA


(Pipit Buana Sari, SE., MM)

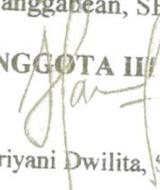
ANGGOTA II


(Dra Mariyam, Ak., MSi., CA)

ANGGOTA I


(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA III


(Handriyani Dwilita, SE., M.Si)

ANGGOTA IV


(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roindah
NPM : 1615100216
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi :PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMKO MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet aau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, November 2021


Roindah

1615100216



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 30106060 PO BOX 1099 Medan
Email: admin_fa@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

REKAPTAS
Kelas
Dosen Pembimbing
Nama Mahasiswa
Program Studi
Stambuk/NPM
Mata Kuliah
Judul Skripsi

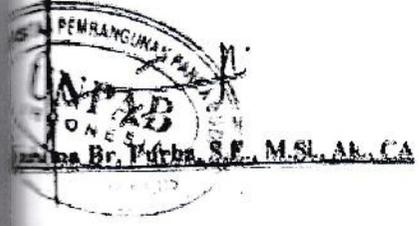
Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
Roindah
Akuntansi
1615100216
Strata I
Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemko Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/10/2020	- Latar belakang masalah bakum keuangan / jels diper masalahnya - Perbaiki populasi dan sampel (Sebutkan kriteria) - Cekang dengan data pd latar belakang masalah - Rumusan masalah, jenis penelitian, hipotesis dan metodologi penelitian harus sejalan. - Daftar pustaka lengkap & sesuai.		
10/11/2020	- lampiran / hasil perhitungan data penelitian ditulis latar belakang masalah. - Daftar pustaka. - Menutupi uraian tabel standar proses penelitian - Daftar pustaka		
12/12/2020	- Perbaiki Rumusan masalah. - uraian kriteria pemilihan sampel - lampiran ke arsip & data wawancara - Buat foto dokumentasi awal.		

Aca Seminar proposal

12/12
- 2020

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



Dosen Pembimbing

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 30106060 P.O. BOX 1099 Medan
 Email: admin_f@unpab.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

SEM/PTS
 Fakultas
 Dosen Pembimbing
 Mahasiswa Jurusan/Program
 Studi Nomor Stambuk/NPM
 Bidang Pendidikan
 Judul Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi
 SOSIAL SAINS
 Dra Mariyam, Ak.M.Si.CA
 Reindah
 Akuntansi
 1615100216
 Strata I
 Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM
 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemko Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15-2-21	1. Perbaiki daftar isi 2. Hubungkan daftar pustaka dg referensi di bab 1, 2, 3 Perbaiki SAK → menjadi SAP 3. Perbaiki tabel 3-1		
15-2-21	Hal 2 literatur tabel di perbaiki, kpl ✓ ds setoran mengikatkan lengkap		

Ditahui / Disetujui Oleh :
 Nama Prodi Akuntansi

Dosen Pembimbing



Dra Mariyam, Ak.M.Si.CA



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 30106060 PO.BOX. 1099 Medan
Email: admin_fe@umpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

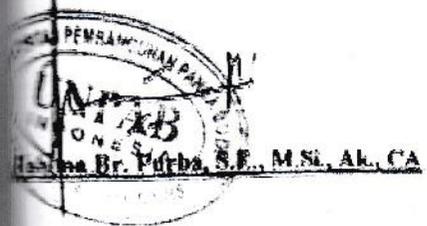
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

WISYATA : Universitas Pembangunan Panca Budi
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing : Fitri Yanti Panggabean, SE., M.Si
Mahasiswa : Reindah
Program Studi : Akuntansi
NPM : 1615100216
Strata : I
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan

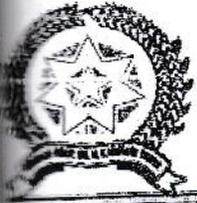
TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/05/2021	<p>- pada bab 3 apa itu Grand theory pendakian penelitian (theory dasar)</p> <p>- kegunaan penelitian (substantive sumber atau variabelnya adalah dimana / siapa??)</p> <p>- lingkungan latar belakang penelitian</p> <p>- Tahapan Riset awal</p> <p>- sumber data kekuasaan!</p> <p align="center">Ace bidang skripsi  27/05/2021</p>		

Ditandatangani / Diastujui Oleh :
 Reindah Akuntansi

Dosen Pembimbing




 Fitri Yanti Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 30106060 PO BOX 1099 Medan
 Email: admin_fe@unpab.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing : Dra Mariyam, Ak. MSi., CA
 Nama Mahasiswa : Rotindah
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Stambuk/NPM : 1615100216
 Jenjang Pendidikan : Strata 1
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20-5-21	1. Perbaiki nama pembimbing! 2. Perbaiki kata pengantar, masukkan kamus ke dalam badan yg tulis pembantu penelitian sendiri! 3. Hal 59 → perbaiki! (judul tidak tulis pns di in)	1/21	
5-6-21	Hal 2 di atas tulis di perbaiki, make kepd jbs dapat menghanti <u>sidang</u> skripsi.	1/21	

Disetujui / Disetujui Oleh
 Prodi Akuntansi



Eshana B. Purba, S.E., M.Si., Ak. CA

Dosen Pembimbing

4/6/21

Dra Mariyam, Ak. MSi., CA



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROINDAH
NPM : 1615100216
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
29 Desember 2020	Telah Acc untuk Seminar Proposal.	Disetujui	
05 Juni 2021	Acc. Sidang Skripsi.	Disetujui	
25 Oktober 2021	Acc jilid Lux.	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing.



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RONDHAH
NPM : 1615100216
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dra. Maryam, Ak, MSi., CA
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
15 Februari 2021	Pembimbingan 2 Dra. Maryam Ak. MSi. CA	Disetujui	
15 Februari 2021	Telah di ACC Seminar Proposal	Disetujui	
05 Juni 2021	ACC sidang Skripsi Pada tgl 4 Juni 2021	Disetujui	
01 November 2021	Setuju jilid lux	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dra. Maryam, Ak, MSi., CA

Acc Seminar Proposal
10/12
2020



Acc, Sem pro
Kerb II
15/2
Kerigan

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMKO
MEDAN**

PROPOSAL

Oleh:

ROINDAH

1615100216

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



Acc Sidang Skripsi

27/05
-2021

Acc Sidang
Skripsi

4/6/21

Harigan

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMKO
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ROINDAH

1615100216

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**



Ace Jind Lxx
15/10/2021

Ace Jind Lxx
30/10/2021
Kunig

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMKO
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ROINDAH
1615100216**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4438/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

NAMA : ROINDAH
NIM : 1615100216
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

sejak tanggal 22 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015

Hai : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 Juni 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROINDAH
Tempat/Tgl. Lahir : PARDOMUAN NAULI / 21 Juli 1998
Nama Orang Tua : Jonner Alfensus Manihuruk
N. P. M : 1615100216
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082277091036
Alamat : Jl. Gatot Subroto KM. 4,5 Gang Mantri No. 32A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kir
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ROINDAH
1615100216

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ROINDAH
N. P. M : 1615100216
Tempat/Tgl. Lahir : PARDOMUAN NAULI / 21 Juli 1998
Alamat : Jl. Gatot Subroto KM. 4,5 Gang Mantri No. 32A
No. HP : 082277091036
Nama Orang Tua : Jonner Alfensus Manihuruk/Edita Nurmaida Br Haloho
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 22 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROINDAH
 Tanggal Lahir : PARDOMUAN NAULI / 21 Juli 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100216
 Jurusan Studi : Akuntansi
 Program Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.51
 NIM : 082277091036

yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

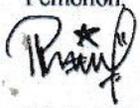
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Ditandatangani oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang bertanda Tangan


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)
 Rektor I, Universitas Pembangunan Panca Budi Sumatera Utara

Medan, 18 Februari 2021

Pemohon

 (Roindah)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 23 Februari 2021

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi.

(Dr Rahima H Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 24 Februari 2021

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Dra Maryam, Ak, MSi., CA)

Dokumen: FM-UPM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff. 22 Oktober 2018

Sambardokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 18 Februari 2021 12:23:43



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

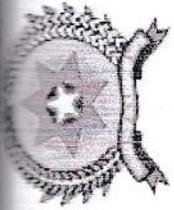
Nama Mahasiswa : ROINDAH
NPM : 1615100216
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
29 Desember 2020	Telah Acc untuk Seminar Proposal.	Disetujui	
05 Juni 2021	Acc. Sidang Skripsi.	Disetujui	
25 Oktober 2021	Acc jilid Lux.	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROINDAH
NPM : 1615100216
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dra Maryam, Ak, MSI., CA
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
15 Februari 2021	Pembimbing 2 Dra Maryam Ak. MSI. CA	Disetujui	
15 Februari 2021	Telah di ACC Seminar Proposal	Disetujui	
05 Juni 2021	ACC sidang Skripsi Pada tgl 4 Juni 2021	Disetujui	
01 November 2021	Setuju jilid lux	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dra Maryam, Ak, MSI., CA

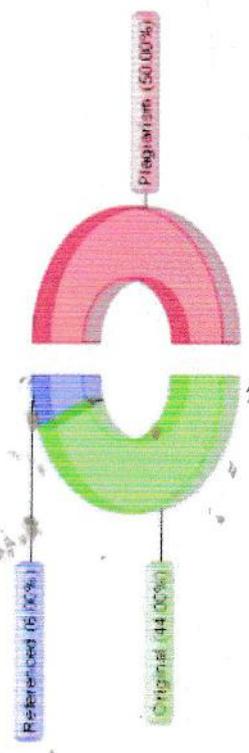
File path document: ROINDAH_1615100216_AKUNTANSI.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1 Comparison Preset Rewrite 2 Deleted language
- 3 Check type Internet Check



Detailed document body analysis

4 Relation chart



5 Distribution graph



Top sources of plagiarism 57

391% 52817 | <https://jurnal.uniba.ac.id/index.php/IJAA/article/download/305/4503>

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Muisir Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROINDAH
Tempat / Tanggal Lahir : Pardomuan Nauli / 21-07-1998
NPM : 1615100216
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Pardomuan Nauli

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 November 2021

membuat pernyataan



ROINDAH

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner yang diibagikan kepada staff Pemko Medan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemko Medan, begitu pula dengan kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemko Medan. Secara simultan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemko Medan.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Medan

ABSTRACT

The research was titled " Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan." This research aims to determine the influence of the application of the regional financial accounting system and the competence of human resources on the quality of financial reports at Pemko Medan both partially and simultaneously. The research method used in this research is an associative method with a quantitative approach. The data collection techniques in this study are documentation and library studies. The type of data used in this study is primary data in the form of a questionnaire that is distributed to the staff of Pemko Medan which is related to this research. The results showed that the application of the regional financial accounting system was partially influential on the quality of financial reports at Pemko Medan, likewise the competence of human resources had partial the application of the regional financial accounting system and the competence of human resources has an effect on the quality of financial reports at Pemko Medan.

Keywords: The Regional Financial Accounting System , The Competence of Human Resources, The Quality of Financial Reports, Pemerintah Kota Medan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam mengatasi kendala – kendala yang penulis alami selama melakukan penelitian ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn, sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br Purba, S.E., M.Si., Ak.,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.

5. Ibu Dra Mariyam, Ak., MSi., CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Sosial Sains yang telah memberikan ilmu serta jasa kepada penulis selama ini.
7. Bapak Muhammad Sayuti Harahap, selaku Kasubbid Pembukuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk diteliti.
8. Orangtua penulis, Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa serta dukungan. Terimakasih untuk semua yang telah Bapak dan Mamak berikan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, bantuan serta bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, November 2021

Penulis

Roindah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisa Data	38

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	4.1 Hasil Penelitian	44
	4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan	44
	4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.....	45
	4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan .	47
	4.1.4 Jaringan Kegiatan Pemerintah Kota Medan ...	54
	4.1.5 Data Hasil Responden	56
	4.1.6 Uji Kualitas Data	57
	4.1.7 Uji Asumsi Klasik	59
	4.1.8 Analisis Data.....	62
	4.2 Pembahasan.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	70
	5.1 Kesimpulan	70
	5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian	36
Tabel 4.1 Hasil Data Kuesioner.....	56
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	57
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	65
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan	47
Gambar 4.2 Grafik <i>Scatterplot</i>	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance* dibutuhkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adanya otonomi daerah secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi

keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting, termasuk entitas pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompotensi yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, Keuangan Daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nurillah, 2014). Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur mulai dari tahap awal pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten/Kota setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Darah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Penelitian ini dilakukan karena diantara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu pemerintah daerah yang mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 (www.sumut.bpk.go.id). Hasil ini membuat Pemko Medan mendapat nilai WDP dari BPK lima kali berturut turut sejak Tahun 2015 silam (Lampiran). Padahal di tahun anggaran 2014, Kota Medan memperoleh hasil opini WTP dan telah 4 kali memperoleh opini audit dengan WTP (Panggabean, 2019). Hal ini terjadi karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam ilmu akuntansi sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pendampingan serta terdapat pengelolaan aset yang belum memadai. Dilihat dari opini audit, status Wajar Dengan Pengecualian belum menjadi yang terbaik dan masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan juga mempengaruhi hasil opini laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK nantinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemko Medan”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Pemerintah Kota Medan mendapatkan opini WDP sejak Tahun 2015 - 2019 atas penyajian laporan yang dilakukan Pemko Medan. Laporan keuangan sudah Standar akuntansi Pemerintahan namun masih ada yang harus diperbaiki (www.pemkomedan.go.id).
- b) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam ilmu Akuntansi sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pendampingan (www.bpkp.go.id pada LHP Tahun 2019).

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan ini dibuat agar fokus dan tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis membatasi masalah yaitu hanya pada Analisis sistem yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang diterapkan pada Pemko Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan ilmu tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah khususnya sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan informasi dalam mengambil kebijakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, yang nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian dari Riedy Riandani (2017), yang berjudul "Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)". Sedangkan penelitian ini berjudul "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pada Pemko Medan”. Hasil penelitian yang dilakukan Riedy Riandani menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian: peneliti terdahulu menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan peneliti ini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.
2. Jumlah Observasi/Sampel: penelitian terdahulu menggunakan sampel 60 responden, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 30 responden.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemko Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

a. Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Menurut Donaldson dan Davis, teori ini menjelaskan tentang situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sedangkan menurut Murwaningsih teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab dan manusia merupakan individu yang berintegrasi (Priyanti, 2018). Teori *Stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017). Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Wahida, 2015).

Laporan Keuangan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan informasi lain yang berkaitan secara relevan. Laporan Keuangan yang dibuat Pemerintah Daerah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Awal perkembangannya akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Kontrak hubungan antara *stewards* dengan *principals* yakni atas dasar kepercayaan, bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Maka dari itu, teori ini sangat cocok diterapkan untuk penelitian karena teori ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diamanahkan tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Sementara itu, menurut Rasdianto (2013) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan baik menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

b. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah

adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah daerah.

Defenisi sistem akuntansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 adalah “rangkaiannya sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang mengacu

pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca SKPD, Catatan Atas Laporan Arus Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas

dalam rangka pertanggungjawaban pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas yang ada melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Ketepatan Pajak
 - 2) Surat Tanda Bukti Pembayaran
 - 3) Bukti Transfer
 - 4) Bukti Penerimaan Lainnya.
- 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka peertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana
 - 2) Nota Debet Bank, dan
 - 3) Bukti Pengeluaran Kas Lainnya
- 3) Prosedur Akuntansi Aset

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah “serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”.

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan kedalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang dapat dilakukan adalah metode garis lurus, menurun ganda dan unit produksi.

Bukti transaksi yang digunakan berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Jenis/nama aset tetap
 - 2) Kode rekening terkait
 - 3) Klasifikasi aset tetap
 - 4) Nilai aset tetap
 - 5) Tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa akuntansi selain kas adalah “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut di posting kedalam buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Bukti memorial
- 2) Berita acara penerimaan barang
- 3) Berita acara serah terima barang
- 4) Surat keputusan penghapusan barang
- 5) Berita acara penilaian dan
- 6) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

d. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kata “penerapan” dalam kamus Bahasa Indonesia adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Namun, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bisa saja mengalami hambatan dan kendala akibat ketidaksesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah oleh aparat pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berlangsung optimal menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan tersebut.

Dalam penerapan sistem akuntansi harus dipedomani peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Konsekuensi dari peraturan pelaksanaan yang harus dipedomani dalam sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, mengakibatkan hasil yang diperoleh dari penerapan sistem akuntansi juga akan menentukan, terlihat dalam menyusun laporan keuangannya yang terdiri atas laporan realisasi anggaran dan neraca serta catatan atas laporan keuangan. Penyajian neraca dari tahun ke tahun dapat disajikan secara konsisten sehingga dapat diperbandingkan serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholdernya. Berarti penyajian neraca telah memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti. Namun tidak demikian halnya dalam penyajian laporan realisasi anggaran, setiap tahun yang bertepatan dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan yang baru akan berbeda hasilnya. Penyajian akun tidak konsisten dari satu tahun ke tahun berikutnya sehingga tidak dapat dikatakan komparatif, atau tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah yang berlaku pada saat laporan diterbitkan. Terhadap konsistensi pengakuan dan pengukuran, dan penyajian belanja dalam struktur APBD pada laporan realisasi anggaran sebagai dampak peraturan saat itu sangat mempengaruhi penyajian akun belanja sehingga laporan realisasi anggaran APBD tidak dapat diperbandingkan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Sudarmanto (2015) kompetensi merupakan atribut untuk melekatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau unggul. Atribut mengacu kepada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Oleh karenanya, atribut terdiri atas persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu.

Sedangkan menurut Wibowo (2016) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan dibidang tersebut. Menurut Mangkunegara (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang memengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemauan dan kemampuan sumber daya manusia yang dilandasi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja untuk melakukan tugas tertentu.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap unit Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintahan.

b. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Gordon dalam Sutrisno (2011), menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sumber daya manusia.

Adapun yang menjadi aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sumber daya manusia menurut Gordon dalam Sutrisno (2011), yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
- 2) Pemahaman (*understanding*) yaitu keadaan kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
- 3) Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap efektif dan efisien.
- 4) Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
- 5) Sikap (*attitude*) yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
- 6) Minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan aktivitas kerja.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut berupa pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Windiastuti, 2013).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan berdasarkan Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat

beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, social bahkan politik.

d. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun dari segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2) Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Hernawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Variabel dependen kualitas laporan keuangan Menggunakan variabel independen kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan daerah 	Menggunakan sampel sebanyak 195 orang untuk 28 SKPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi SDM, penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan	<ol style="list-style-type: none"> Variabel dependen kualitas laporan keuangan Menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi 	Menggunakan sampel sebanyak 26 SKPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Keuangan Daerah	keuangan daerah.		Sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Daerah, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Dearah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen kualitas laporan keuangan 2. Menggunakan variabel independen penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan sampel sebanyak 3 Dinas dengan jumlah 53 responden 2. Menggunakan jenis penelitian Explanatory 3. Menggunakan metode <i>non probability sampling</i> sebagai teknik pengambilan sampel 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Rasyidah Nadir, Hasyim (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen kualitas laporan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan sampel sebanyak 33 SKPD 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi

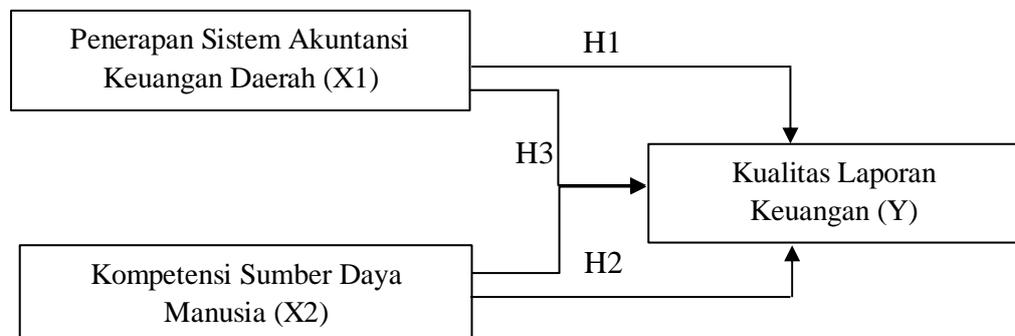
Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	2. Menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia	2. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis)	informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.
Riedy Riandani (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Variabel dependen kualitas laporan keuangan 2. Menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia	Menggunakan populasi sebanyak 30 SKPD dan total responden 60 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan pemanfaatan

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan secara spesifik pola pikir hubungan antar variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Berdasarkan telaah teoritis diatas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen (bebas). Dan variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan kasual dan pengaruh antar variabel-variabel yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemko Medan, Jln. Kapten Maulana No.2 Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penyusunan proposal penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2021.

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2019 – April 2021																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Riset awal/ Pengajuan Judul																	
2	Penyusunan Proposal																	
3	Seminar Proposal																	
4	Perbaikan/Acc proposal																	
5	Pengolahan Data																	
6	Penyusunan Skripsi																	
7	Bimbingan skripsi																	

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *purposive sampling* yaitu pendekatan pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti. Kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang pegawai yang terdiri dari 12 pegawai subbid akuntansi, 10 pegawai subbag keuangan, dan 8 pegawai subbid pelaporan.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat

pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skors atau pertanyaan yang diberi bobot.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Kuesioner akan diberikan secara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan serta cara pengisian kuesioner. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2019). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel

terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan.

3.4.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran yang diterapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas dapat diterapkan indikatornya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Defenisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Defenisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkap 2. Akurat 3. Mudah dipahami 4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 	Likert
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Kemampuan untuk melaksanakan/melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap kerja 	Likert

	yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016).		
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sebagai kebutuhan bersama pengguna laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dibandingkan 	Likert

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan data baik bersifat lisan maupun tulisan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (*questionnaire*)

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode angket/kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini disebarakan kepada responden kemudian dikumpulkan kembali kepada penulis.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendukung data primer, data sekunder yang dikumpulkan berupa data-data Pemko Medan seperti sejarah singkat Pemko Medan, visi misi Pemko Medan,

dan struktur organisasi Pemko Medan, serta data-data yang terkait yang berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen.

3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji literature, bahan referensi, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Pengujian data bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan realibel. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses pengujian data untuk melihat apakah alat ukur berupa kuesioner yang dipakai dapat menguji dengan akurat atau tidak. Cara yang dipakai untuk mengetahui validitas alat ukur adalah mengkorelasi antara skor yang diperoleh masing-masing skor dengan skor total. Analisis pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas < 0.01 atau $< 0,05$ berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabel suatu variabel penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach alpha* (α) jika nilai *Cronbach alpha* $> 0,70$. Semakin nilai alphanya mendekati angka satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik terhadap data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan kriteria jika $p\text{-value} < 0.05$ berarti data terdistribusi tidak normal.

Model regresi yang baik, hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data distribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data

melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Noor, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau dengan melihat hasil koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai *tolerance* $>0,1$ atau sama dengan VIF <10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Sedangkan jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk dapat melihat ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya atau dimanipulasi (Sugiyono, 2019). Untuk menguji keseluruhan hipotesis, pada penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, dengan model sebagai berikut:

$$y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan: α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

x_1 = Sistem Akuntansi Keuangan Dearah

x_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

y = Kualitas Laporan Keuangan

e = error term

b. Uji Hipotesis

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji F (Uji Simultan)

Ghozali (2013) menyatakan uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol. Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, hal ini

ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol maka variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui besar atau kecilnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dipergunakan koefisien determinan dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan: KD = Koefisien Determinan

R = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan

Hari jadi Kota Medan diperingati setiap tahun sejak 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi kota medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.

Surat keputusan Walikota madya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkarni dibentuklah panitia peneliti hari jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi, SH , Sekretaris Syahrudin Siwan, MA. Untuk lebih mengidentifikasikan kegiatan kepanitian ini dikeluarkan lagi surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusunan sejarah.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitian ini sehingga mereka membentuk pansus yang diketuai M.A Harahap dengan anggotanya antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Bandar Kamil, dan Mas Sutarjo. Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang

didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa kesidang DPRD Tk. II Medan untuk disahkan. Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan surat keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar panitia penyusunan sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan kegiatan yang dilakukan oleh pansus hari jadi Kota Medan yang diketahui oleh M.A Harahap bulan maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai landasanya adalah didirikan Si Sepuluh Dua Kuta di areal Medan.

Pada akhirnya DPRD Tk. II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan dan mencabut hari ulang tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan Pasal 187A, Pasal 187 B dan 187 C Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan

a. Visi Pemko Medan

Dengan visi “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

b. Misi Pemko Medan

1) Kerjasama

Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2) Kreatifitas dan inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan birokratisasi sekaligus penciptaan iklim pengembangan kreatifitas kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3) Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4) Penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5) Multikulturalisme

Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan social, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6) Tata Ruang Kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7) Peningkatan kesempatan kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

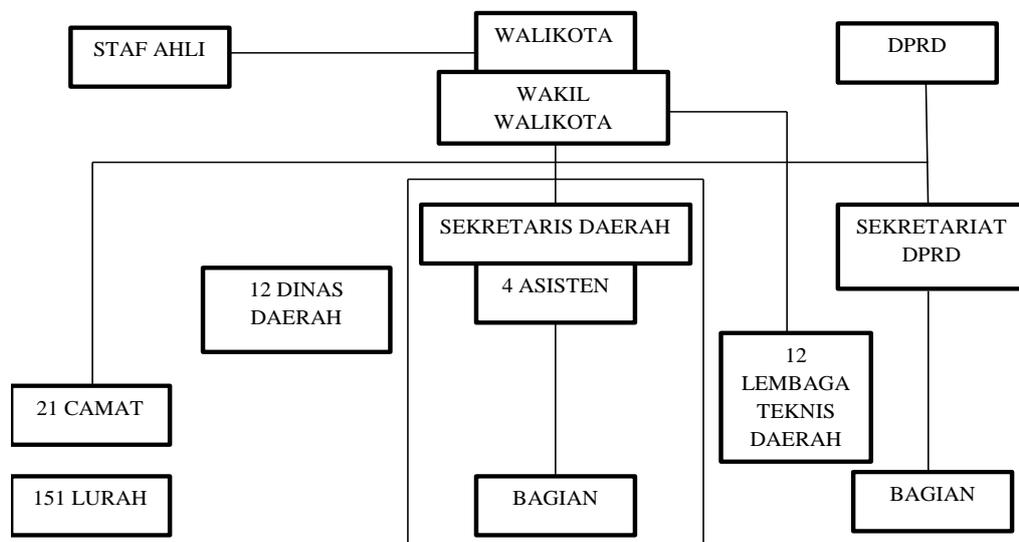
8) Smart City

Mengembangkan Medan sebagai Smart City.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan

Untuk memudahkan pengawasan dan peraturan kerja terhadap pegawai di perlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/intansi dimana struktur organisasi ini memberikan penjelasan tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban oleh masing-masing pegawai/pejabat untuk mengetahui tugas-tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sehingga aktifitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan tepat serta baik tanpa adanya kendala yang timbul dalam perusahaan/intansi tersebut. Untuk lebih memperjelas, pada gambar berikut ditampilkan Struktur Organisasi Pemko Medan:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan



Tugas dan Fungsi dari organisasi Pemko Medan terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan Umum

Dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya pembinaan dan mengkoordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah, perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan dan hubungan masyarakat. Asisten Pemerintah mempunyai fungsi antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Menyusun program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintah.
3. Merumuskan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
4. Mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
5. Melaksanakan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan hubungan antar pemerintah.
6. Menyusun bahan kebijakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Kepala Daerah.
8. Memfasilitasi pemahaman konsep bernegara dan berbangsa bagi seluruh jaringan pemerintah daerah.
9. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan hubungan diantara strata pemerintah.
10. Memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

11. Memfasilitasi tertibnya kepastian batas dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
12. Memfasilitasi tertibnya kepastian batas antara kecamatan dengan kecamatan, kecamatan dengan kelurahan dan kelurahan dengan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
13. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pemerintah lintas daerah dan lintas sektoral serta mengupayakan terbangunnya sikap netral (para pegawai negeri di kota terhadap semua organisasi/partai politik).
14. Mengkordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada Daerah baik akhir tahun maupun berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Asisten Kesejahteraan Sosial

Asisten kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan di bidang kesejahteraan sosial serta memonitoring perkembangan pelaksanaannya. Asisten kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.

2. Mengkordinasi pengumpulan bahan dan data di bidang pembinaan kesejahteraan sosial.
3. Mengkoordinasi penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan kesejahteraan sosial.
4. Mengkoordinasi penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan sarana dan prasarana kesejahteraan Sosial.
5. Mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan serta pengendalian dibidang agama, pendidikan, dan kebudayaan, pemuda dan olahraga.
6. Mengkordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan serta pengendalian dibidang bina kesehatan, ketenaga kerjaan, dan bina sosial dan pemberdayaan perempuan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Daerah Asisten Administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan.
2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik pembinaan administrasi umum

3. Mengkordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan administrasi keuangan.
4. Mengkordinasikan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha/ sandi dan telekomunikasi, kearsipan, kepegawaian, protokol dan perlengkapan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu dan memberikan pelayanan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi umum dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan, belanja daerah dan membina administrasi keuanganserta pembukuan.

2. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyiapkan teknik pelaksanaannya serta menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPR Daerah dan melaksanakan tugas ketetausahaan bagian.

3. Sub Bagian Perbendaharaan mempunya tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU), menguji kebenaran penagihan, pembinaan

ketata usahaan keuangan, menyelesaikan masalah pembendaharaan dang anti rugi serta membina pembendaharaan.

4. Sub Bagian Belanja Pegawai mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana dan perubahan belanja pegawai, menerbitkan surat perintah membayar utang (SPMU) belanja pegawai menerbitkan asministrasi dan pembinaan bendaharawan pengelola gaji.

5. Sub Bagian Kas Negara mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pembayaran semua pendapatan/belaja daerah dalam melaksanakan kegiatan kas daerah.

6. Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap berkas pertanggung jawaban atas realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

7. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas:

Pengumpulan bahan dan data serta melaksanakan pembukuan secara sistematis dan klonologis serta melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh kepala bagian, yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dan mempunya tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja;
2. Melaksanakan kegiatan tata usaha umum dan pimpinan;
3. Melaksanakan urusan keuangan sekretariat;
4. Melaksanakan pembinaan kearsipan dan kepegawayan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat;
6. Melaksanakan urusan protokol dan perjalanan daerah;
7. Menyusun rencana kebutuhan dibidang perbekalan dan materil;
8. Melaksanakan administrasi perbekalan dan materil;
9. Melaksanakan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan perbekalan dan materil;
10. Melaksanakan kegiatan sandi dan telekomunikasi;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan urusan tata usaha umum dan pimpinan, melakukan tatausaha keuangan sekretariat serta melaksanakan urusan perbekalan dan materil.

2. Sub Bagian Administrasi Arsip dan kepegawaian mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data, mengendalikan dan membina administrasi kearsipan serta kepegawayan sekretariat.

3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana kebutuhan perlengkapan, menyimpan, mendistribusikan dan membina administrasi perlengkapan materil.

4. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun acara keprotokolan dan melaksanakan kegiatan administrasi perjalanan dinas.

5. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan urusan kerumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruang, rumah dinas serta memelihara kebersihan kantor dan perkarnangan.

6. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas:

Melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi, pembinaan dan memelihara alat-alat sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi.

4.1.4 Jaringan Kegiatan Pemko Medan

Adapun jaringan kegiatan pada kantor walikota Medan, yaitu dinas-dinas di Kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuang kepada BPKD Kota Medan untuk dikonsolidasikan dan diberi kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban.

a. Kinerja Kegiatan Terkini

Setiap perusahaan tentunya mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua. Begitu juga pada Pemerintah Kota Medan yang terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh Pemko Medan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan Pemerintahan Kota Medan yaitu peningkatan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah kota medan dengan meningkatkan kualitas peningkatan keuangan SKPD dengan menggunakan aplikasi SIMDA (sistem informasi Manajemen daerah).

b. Rencana kegiatan

Rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Adapun rencana kegiatan pada PEMKO Medan, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

4.1.5 Data Hasil Responden

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam Ms Office Excel 2010 dan diolah menggunakan program SPSS 22. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada responden yang berada pada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Medan.

Tabel 4.1 Data Hasil Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	30
Kuesioner yang kembali	30
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang ditolak	-
Kusioner yang digunakan dalam penelitian	30
Tingkat pengembalian (<i>Respon rate</i>)	100%

Sumber : Data diolah penulis (2021)

Responden dalam penelitian ini adalah kabag/kasubag ataupun staff yang ada pada bagian keuangan dan bendahara baik penerima maupun pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, lama bekerja dan pendidikan terakhir.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Pria	19	63%
	2. Wanita	11	37%
	Total	30	100%
2	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA/Sederajat	3	10%
	2. Diploma (D III)	1	3%
	3. Sarjana (S1)	21	70%
	4. Pasca Sarjana (S2)	5	17%
	Total	30	100%
3	Lama Bekerja		
	1. 1-5 Tahun	3	10%
	2. 5-10 Tahun	8	27%
	3. > 10 Tahun	19	63%
	Total	30	100%

Sumber : data diolah penulis (2021)

4.1.6 Uji Kualitas Data

4.1.6.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* melalui program SPSS 22. Hal pertama yang dilakukan dalam pengujian validitas adalah melakukan tabulasi data, kemudian berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi antar skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (N=30) maka didapat r tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=30)	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	P1	0,405	0,361	Valid
	P2	0,920	0,361	Valid
	P3	0,406	0,361	Valid
	P4	0,608	0,361	Valid
	P5	0,508	0,361	Valid
	P6	0,631	0,361	Valid
	P7	0,647	0,361	Valid
	P8	0,750	0,361	Valid
	P9	0,808	0,361	Valid
	P10	0,850	0,361	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	P1	0,512	0,361	Valid
	P2	0,527	0,361	Valid
	P3	0,809	0,361	Valid
	P4	0,771	0,361	Valid
	P5	0,645	0,361	Valid
	P6	0,850	0,361	Valid
	P7	0,540	0,361	Valid
	P8	0,540	0,361	Valid
	P9	0,411	0,361	Valid
	P10	0,693	0,361	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	P1	0,734	0,361	Valid
	P2	0,482	0,361	Valid
	P3	0,858	0,361	Valid
	P4	0,666	0,361	Valid
	P5	0,902	0,361	Valid
	P6	0,371	0,361	Valid
	P7	0,724	0,361	Valid
	P8	0,611	0,361	Valid
	P9	0,701	0,361	Valid
	P10	0,919	0,361	Valid

Sumber : Data yang diolah SPSS 22

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji validitas data pada seluruh item pertanyaan memenuhi syarat nilai r tabel $> 0,361$ dan dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid dan dapat digunakan dalam pengujian reliabilitas dan analisis data selanjutnya.

4.1.6.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang valid. Instrumen penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antar skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,811	10	Reliable
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,806	10	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan	0,790	10	Reliable

Sumber : Data yang diolah SPSS 22

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada ketiga variabel diatas 0,70 yang berarti data dalam penelitian ini reliabel.

4.1.7 Uji Asumsi Klasik

4.1.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual bersifat normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melakukan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini yaitu nilai *value* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* > *level of significant* ($\alpha=5\%$).

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18402560
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.119
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan pengolahan data pada Tabel 4.5 diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.183 yang mana lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.1.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* pada model regresi. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi lebih dari 0.09, maka merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Dalam suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10. Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-.533	4.565		-.117	.908			
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.472	.182	.423	2.595	.015	.329	3.036	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.471	.156	.493	3.026	.005	.329	3.036	

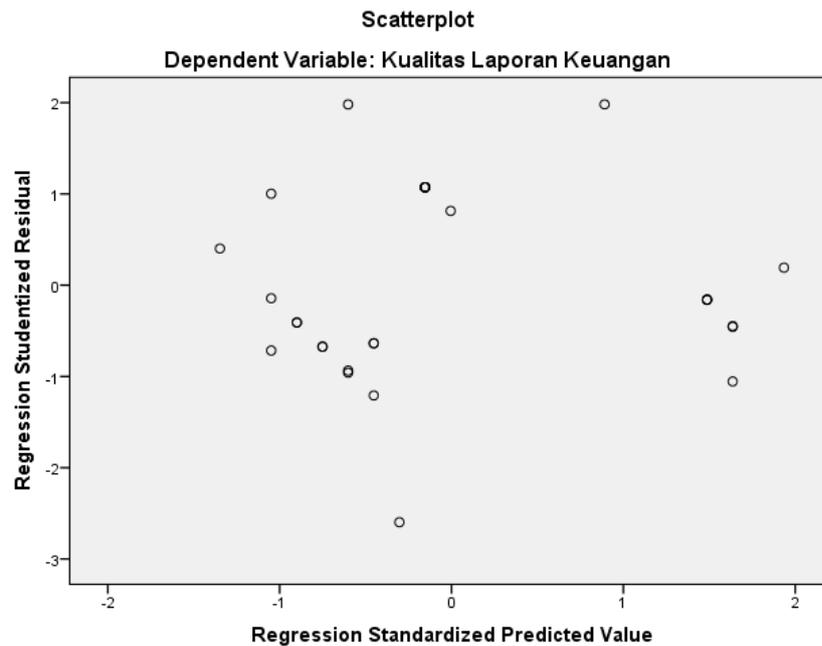
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan VIF. Masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai *tolerance* 0.329 dengan VIF 3.036; Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *tolerance* 0.329 dengan VIF 3.036. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam variabel independennya.

4.1.7.3 Uji Heteroskedastitas

Dalam melakukan pengujian heteroskedastitas dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik dengan cara membaca grafik *Scatterplot*, dimana tidak terjadi heteroskedastitas apabila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastitas.

Gambar 4.2 Grafik *Scatterplot*



Gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karen itu, dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastitas.

4.1.8 Analisis Data

4.1.8.1 Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan, dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 22, maka diperoleh hasil uji pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.533	4.565		-.117	.908
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.472	.182	.423	2.595	.015
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.471	.156	.493	3.026	.005

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Model regresi yang terbentuk berdasarkan Tabel 4.7 adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.533 + 0.472X_1 + 0.471X_2$$

Dimana :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda diatas, masing-masing variabel menjelaskan bahwa:

1. Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar -0.533, artinya Penerapna Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dianggap konstan maka tingkat kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konstans sebesar -0.533 .
2. Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 0.472 artinya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.472 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

3. Koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) sebesar 0.471 artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.471 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.1.8.2 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda juga dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap variabel dependen/terikat (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.764	.746	1.822

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Koefisien determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan besarnya R² adalah 0.764, dengan demikian besarnya pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 76,4%. Sedangkan

sisanya adalah 23,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti pada penelitian ini.

4.1.8.3 Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial (uji t) disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-.533	4.565		
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.472	.182	.423	2.595	.015
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.471	.156	.493	3.026	.005

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh sebesar 2.595 lebih besar dari t tabel 2,051 dan signifikan $0.015 < 0,05$, maka hipotesis (H1) yang diajukan diterima. Hal ini berarti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara

parsial berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

2. Nilai t hitung variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diperoleh sebesar 3,026 lebih besar dari t tabel dan signifikan $0.005 < 0.05$, maka hipotesis (H2) yang diajukan diterima. Hal ini berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen/bebas yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289.745	2	144.873	43.645	.000 ^b
	Residual	89.621	27	3.319		
	Total	379.367	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai F hitung 43,645 lebih besar dari F tabel 3,35 dan signifikan $0.000 < 0.05$, maka hipotesis (H3) yang diajukan diterima. Hal ini berarti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Penerapan Sistem Akuntansi Daerah sebesar $0,015 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung untuk variabel penerapan sistem akuntansi daerah lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $2,595 >$ nilai t tabel $2,051$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kadek, Nyoman dan Ni (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung untuk variabel kompetensi Sumber Daya Manusia lebih besar dari nilai t

tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $3,026 >$ nilai t tabel $2,051$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah kota Medan, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kadek, Nyoman dan Ni (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berarti H_3 diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai f hitung untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia lebih besar dari nilai f tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai f hitung sebesar $43,364 >$ nilai f tabel sebesar $3,35$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kadek, Nyoman dan Ni (2014) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil regresi linier berganda sebesar 0,764. Nilai koefisien korelasi tersebut menggambarkan bahwa sebesar 76,4% kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sedangkan sisanya sebesar 23,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari analisis yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemko Medan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan metode asosiatif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang pegawai yang terdiri dari sub bidang akuntansi, sub bagian keuangan, dan sub bidang pelaporan. Berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemko Medan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Penerapan Sistem Akuntansi Daerah sebesar $0,015 < 0,05$ dan nilai t hitung untuk variabel penerapan sistem akuntansi daerah lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $2,595 >$ nilai t tabel $2,051$.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemko Medan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai sig. variabel

kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung untuk variabel kompetensi Sumber Daya Manusia lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $3,026 > \text{nilai } t \text{ tabel } 2,051$.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemko Medan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berarti H_3 diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai f hitung untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia lebih besar dari nilai f tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai f hitung sebesar $43,364 > \text{nilai } f \text{ tabel sebesar } 3,35$. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil regresi linier berganda sebesar $0,764$. Artinya, sebesar 76,4% Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sedangkan sisanya sebesar

23,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk pihak Pemko Medan agar lebih meningkatkan lagi kompetensi Sumber Daya Manusia serta Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang harus dimaksimalkan agar untuk kedepannya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik dan menerima hasil audit wajar tanpa pengecualian.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel yang akan diteliti dan menambahkan variabel lain yang tidak dibahas di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota)*. Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn.
- Megawati, Luh Kadek Sri, Et. Al. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)*. E-Journal S1 Akuntansi, Vol. 3, No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nadir, Rasyidah Dan Hasyim. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru)*. Journal.Feb.Unmul.Ac.Id, Vol. 14, No. 1. Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Nasution, N. A., & Oktari, A. (2021). Pengaruh Cash Flow, Account Receivable Turnover, Modal Kerja Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 91-115.
- Nurillah, Assyifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pakpahan, David Pranata. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Johan Seentosa Kebun Bangkinang Riau*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Panggabean, Fitri Yani. 2019. *Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. Vol. 5, No. 2, Hal 151-159.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Priyanti, Tuti. 2018. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Skripsi. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.

Rambe, Omar Sakti, Et.Al. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta : Salemba Empat.

Riandani, Riedy. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sdm Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Sanjaya, Achdar. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Makassar: Universitas Alauddin Makassar.

Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.

Sari, P. B. (2020). Analisis Opini Going Concern Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 189-196.

Sudarmanto. 2015. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm*. Edisi Tiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahida. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Wati, Kadek Desiana Et. Al. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. E-Journal Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Edisi Ke-5. Jakarta: Rajawali Pers.

Windiastruti, Ruri. 2014. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)*. Skripsi. Bndung. Universitas Widyatama

Www.Bpkp.Go.Id

[Www.Sumut.Bpk.Go.Id](http://www.sumut.bpk.go.id)

[Www.Pemkomedan.Go.Id](http://www.pemkomedan.go.id)